



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU WARDHANA
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN
3. NHK : 804987

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.748.365.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 2.122.365.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 436 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN , LAINNYA , Rp. 1.526.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 192.000.000

1. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, PEUGEOT 206 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
3. MOBIL, PEUGEOT 405 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 24.501.864

Sub Total Rp. 5.096.866.864

III. HUTANG Rp. 211.200.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.885.666.864

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.